



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2030



**Kecamatan Cibeureum
Kota Sukabumi**

Jl. Sarasa No. 75 Telp./Fax (0266) 233 645 Sukabumi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029. Menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kota Sukabumi melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Akhir kata, semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sukabumi, Maret 2025

Camat Cibeureum

YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P
NIP. 197601022006041012

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS KECAMATAN CIBEUREUM	10
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibeureum.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cibeureum	10
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Cibeureum	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeureum	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	28
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.....	30
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibeureum.....	30
2.2.2 Perumusan Isu-Isu Strategis	31
 BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 36
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Cibeureum.....	36
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Cibeureum	36
3.3 Strategi	42
3.4 Arah Kebijakan	44
 BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
4.1 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	46
4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	69
 BAB V : PENUTUP	 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah RT/ RW.....21

Tabel 2.2 Batas Wilayah Kecamatan Cibeureum23

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Se-Kecamatan Cibeureum Tahun 202423

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....23

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan24

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural24

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Cibeureum25

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeureum
2020-202426

Tabel 2.9 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Cibeureum.....29

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis32

Tabel 3.1 *Logical Framework* Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Kec. Cibeureum Kota Sukabumi 2025- 202939

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun
2025 - 203041

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi
Tahun 2025-202944

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cibeureum Kota
Sukabumi Tahun 2025-202945

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan
Cibeureum, Kota Sukabumi Tahun 2024 dan 202649

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan
Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2025-202959

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah.....69

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibeureum70

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.....	11
Gambar 2.2 Peta Potensi Wilayah	22
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Cibeureum.....	37
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	37
Gambar 4.1 Kerangka Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Resntra Kecamatan Cibeureum	48

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 – 2029

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan lingkup tugas dan wewenang urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang memberi arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Terpilihnya pasangan H. Ayep Zaki dan Bobby Maulana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 maka Kota Sukabumi harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025- 2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan

pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Tahun 2025-2029 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai selama tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Cibeureum Tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

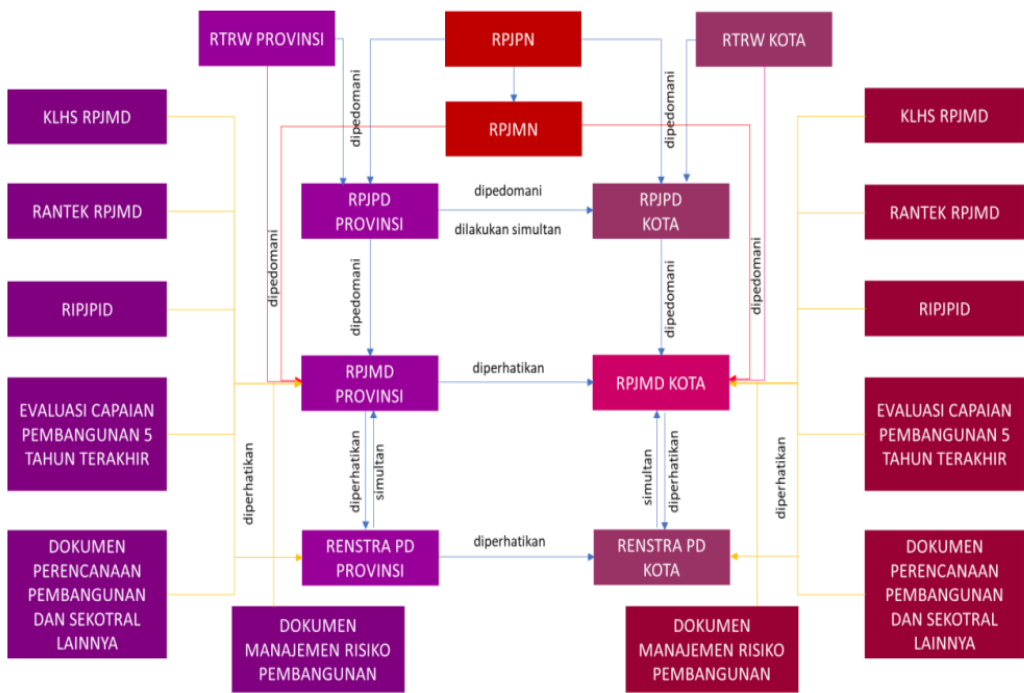
Renstra PD Kecamatan Cibeureum diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kota dengan melaksanakan Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Disamping pembinaan kelembagaan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan upaya peningkatan kualitas Musrenbang yang diikuti dengan pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan tingkat RT dan RW serta kegiatan yang mampu memberikan motivasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan keagamaan, ketentraman dan ketertiban, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan seni dan olah raga.

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (provinsi dan nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kota.

Pola Hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Inmendagri no.2 Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 342 ayat 4 menyebutkan bahwa perubahan RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Substansi Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2025-2029 meliputi kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 beserta indikator kinerjanya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx);
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1); dan
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Cibeureum.

28. Keputusan Wali Kota Sukabumi No. 1884.45/109-TAPEM/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Sukabumi Kepada Camat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan strategis pembangunan dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan Kecamatan Cibeureum serta menjadikan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Cibeureum untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban
2. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kecamatan Cibeureum , sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.
3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kewilayahan untuk mewujudkan Visi Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeureum untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan kewilayahan
2. Sebagai pedoman penyusunan program kerja yang berorientasi pada pelayanan Prima agar menghasilkan kinerja yang maksimal dan lebih memantapkan terselenggaranya

kegiatan yang mengutamakan pada skala prioritas Kecamatan Cibeureum dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembuatan Renstra mengacu kepada Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu terdiri atas 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan;
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
6. Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cibeuerum Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);
7. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
8. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 202-2029 melalui Indikator Kinerja kunci (IKK); dan
9. Program dukungan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi terhadap Capaian Asta Cita.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIBEUREUM

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIBEUREUM

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIBEUREUM

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Kecamatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan Cibeureum terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi.

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

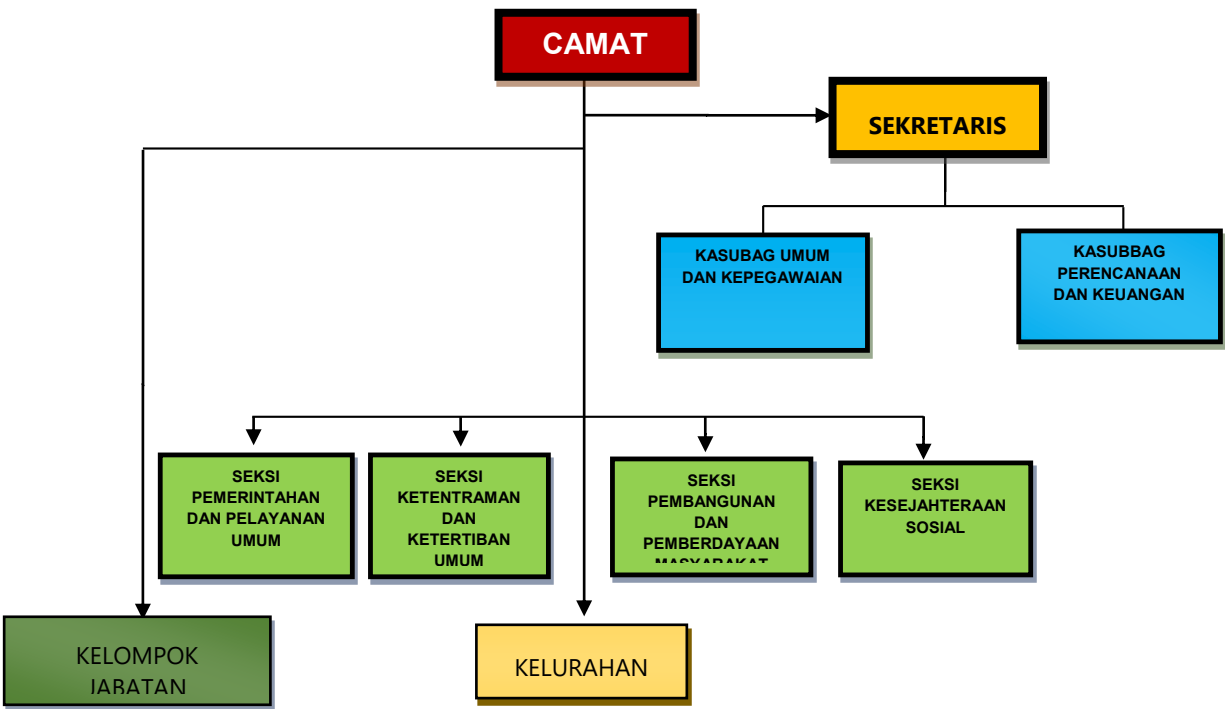
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- 8. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- 9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- 10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya untuk memperkuat Kecamatan, diterbitkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
(Peraturan Walikota No. 160 Tahun 2022)

Gambar 2.1
Bagan Organisasi SKPD Kecamatan
Pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi



Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai tidak lanjut dari ketentuan pasal 61 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Disebutkan kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan bidang tugas unsur-unsur kecamatan dalam hal ini Kecamatan tipe B disebutkan bahwa camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
2. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
4. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
5. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
8. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

9. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
10. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
11. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
12. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
13. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat dibantu oleh :

a. Sekretariat Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada camat dalam hal :

1. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
4. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
5. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;

6. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
7. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
8. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
9. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
10. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
11. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
12. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
13. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
14. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
15. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian,
Subbag Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Kecamatan;
 - c. melaksanakan pelayanan keprotokolan, kepastakaan, dan hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Kecamatan;

- e. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Kecamatan;
- f. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Kecamatan;
- g. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Kecamatan;
- h. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- i. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
- j. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- k. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan standar pelayanan publik;
- m. melaksanakan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- n. melaksanakan pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- o. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan,

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan;
- d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada lingkup Kecamatan;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Kecamatan;
- i. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- j. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- l. membuat laporan keuangan Kecamatan untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- n. melaksanakan penerimaan, pengadministrasian, penyetoran retribusi, dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum:

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
4. melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
5. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
6. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
7. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
8. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
9. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
10. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
11. mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
12. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;

13. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
14. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
15. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinyadengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
3. mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
5. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
6. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

8. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
9. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
10. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
11. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
3. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
4. melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
5. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;
7. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;

8. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
9. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
10. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;
11. melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
12. melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi kesejahteraan sosial; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
4. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
7. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah

- Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- 8. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - 9. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - j. melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - k. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
 - l. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN CIBEUREUM

Secara geografis Kecamatan Cibeureum berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Cibeureum menjadi pusat pertumbuhan kawasan perkantoran dan pendidikan serta berkembangnya kawasan perumahan. Luas wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi 840.168 Ha terdiri dari 4 Kelurahan, 42 Rukun Warga dan 174 Rukun Tetangga.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah RT/ RW

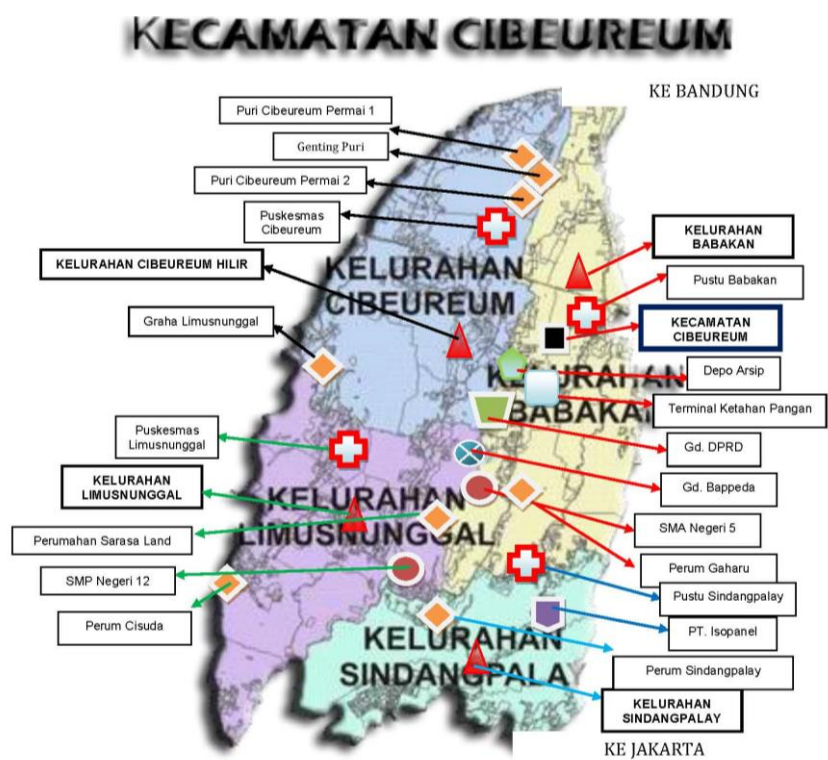
NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	RW	RT
1	Cibeureumhilir	264.875 Ha	12	53
2	Babakan	184.090 Ha	10	44
3	Sindangpalay	164.990 Ha	7	35
4	Limusnunggal	226.213 Ha	13	44
	Jumlah	840.168 Ha	42	176

Sumber : Profil Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

Banyak berubahnya fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain sebagai akibat dari banyaknya pembangunan lahan perumahan, sarana pendidikan dan sebagian untuk lahan industri sehingga berdampak

pada penyempitan luas tanah pertanian khususnya persawahan menjadi suatu fenomena umum di daerah perkotaan.

Letak Kecamatan Cibeureum yang strategis merupakan lahan yang paling diminati para investor untuk pengembangan kawasan perkantoran, pergudangan perumahan, pendidikan dan kawasan bisnis karena wilayah Cibeureum menjadi jalur alternatif lintas provinsi yaitu jalan Salakaso – Garuda dan Lingkar Selatan, yang secara ekonomis ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat baik dari sektor jasa, perdagangan maupun sektor lainnya.



Gambar 2.2
Peta Potensi Wilayah
KET.GAMBAR

	Perumahan		Kelurahan
	Puskesmas		Kecamatan
	Sekolah Negeri		Depo Arsip Daerah
	Gedung DPRD		Terminal Ketahanan Pangan
	Gedung Bappeda		
	PT. Isopanel		

Secara umum mayoritas penduduk Kecamatan Cibeureum beragama Islam, Dengan jumlah penduduk 47.247 jiwa.

Batas-batas wilayah Kecamatan Cibeureum dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Batas Wilayah Kecamatan Cibeureum

BATAS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah utara	Sukaraja	Sukaraja
Sebelah selatan	Baros	Baros
Sebelah timur	Desa Kebon Pedes	Kebon Pedes
Sebelah barat	Nanggaleng	Citamiang

Sumber : Profil Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

Penetapan batas-batas wilayah Kecamatan Cibeureum ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 15 Tahun 2000.

Komposisi Pegawai

Jumlah personel Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Cibeureum sampai bulan Desember 2024 sebanyak 79 pegawai dengan rincian 36 PNS dan 11 pegawai berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) serta 32 Tenaga Harian Lepas (THL).

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Se-Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

NO	KECAMATAN DAN KELURAHAN	PNS				THL/TKK
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	
1	Kec.Cibeureum	1	11	-	-	15
2	Kel. Cibeureumhilir	-	5	1	-	7
3	Kel. Babakan	-	6	1	-	8
4	Kel. Sindangpalay	-	5	-	-	6
5	Kel. Limusnunggal	-	6	-	-	7
	JUMLAH	1	33	2	-	43

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	S2	8	
2	D4	-	
3	S1	23	
4	D3	3	
5	SLTA/SMA	2	
JUMLAH		36	

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	Pembina, IV/a	1	
2	Penata Tk.I, III/d	12	
3	Penata, III/c	15	
4	Penata Muda, Tk.I III/b	3	
5	Penata Muda, III/a	3	
6	Pengatur Tk I, II/d	1	
7	Pengatur, II/c	1	
8	Pengatur Muda Tk.I, II/b	-	
9	TKK/THL	43	
JUMLAH		79	

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	KET
1	Eselon III a	1	
2	Eselon III b	-	
3	Eselon IV a	8	
4	Eselon IV b	22	
JUMLAH		31	

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Cibeureum Tahun 2024

Sarana dan Prasarana Kecamatan Cibeureum

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada Kecamatan Cibeureum sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan program pada umumnya dalam kondisi layak pakai.

Untuk lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tersebut diperlukan pemeliharaan secara rutin serta pengadaan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Cibeureum

No.	Uraian	SALDO AKHIR 31-12-2024		Selisih
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASET LANCAR	3.687.500	3.687.500	-
	Persediaan	3.687.500	3.687.500	-
B.	ASET TETAP	6.039.467.907	6.039.467.907	-
	1. Tanah	1.592.706.000	1.592.706.000	-
	2. Peralatan dan Mesin	2.253.484.230	2.253.484.230	-
	3. Gedung dan Bangunan	4.551.283.534	4.551.283.534	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.094.119.799	1.094.119.799	-
	5. Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	7. Akumulasi Penyusutan	(3.452.125.656)	(3.452.125.656)	-
Ç.	ASET LAINNYA	21.000.000	21.000.000	-
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	2. Aset Tidak Berwujud	21.000.000	21.000.000	-
	3. Aset Lain-lain	-	-	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-

Sumber : Data Aset Hasil Verifikasi BPKD Sampai Dengan Desember Tahun 2024

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CIBEUREUM

Kinerja Kantor Kecamatan Cibeureum tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibeureum Tahun 2020 dan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan										
			Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	78,5	79	79,5	80		86,27	86,39	87,69	87,72	
2	Indeks Pelayanan Publik	Point	2,05					2,98				
3	Jumlah Pelayanan Berbasis Elektronik	Jenis	2					4				
4	Presentase Usulan musrenbang Kelurahan yang di Akomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	Persen		70	75	80			100	100	100	
5	Presentase Laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	Persen		80	85	90			100	100	98,58	
6	Nilai SAKIP SKPD	Point		63	63,15	63,3	63,5		74,44	74,61	74,70	75,15
7	Presentase peningkatan keamanan wilayah Kecamatan Cibeureum	Persen		10	15	20			37,5	40	33,3	
8	Presentase peningkatan	Persen		80	80	90			0	0	100	

	kapasitas personil LINMAS											
9	Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen					100					100
10	Cakupan Layanan Bagi Kesehatan Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	Persen					55					55
11	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen					75					100
12	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persen					100					100

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan untuk memberikan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik

Dalam konsep pelayanan publik, posisi masyarakat ialah sebagai pengguna layanan, yang memiliki hak atas pelayanan publik serta berhak menuntut pelayanan yang seharusnya diperoleh. Namun, masyarakat sesungguhnya bukan hanya sekadar pengguna atau sering dianalogikan sebagai customer, melainkan dapat mengambil bagian atau berperan serta dalam pembangunan.

Ada tiga fungsi pelayanan umum (publik) yang dilakukan pemerintah yaitu *environmental service*, *development service* dan *protective service*. Pelayanan oleh pemerintah juga dibedakan berdasarkan siapa yang menikmati atau menerima dampak layanan baik individu maupun kelompok.

Dari 5 (lima) Program yang dilaksanakan di kecamatan, terdapat 4 (empat) Program yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat untuk ambil bagian atau berperan serta dalam pembangunan kecamatan, dalam program tersebut dapat kita lihat pemilahan atau pembagian kelompok sasaran dari pelayan yang diberikan kecamatan, untuk lebih jelas bisa kita lihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Cibeureum

No.	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan		87,69
1.a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	P2RW	RW se Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rakorwil	Seluruh RT/RW se Kecamatan
1.b	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Musrenbang Kecamatan	ABCGM
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan		
2.a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PKK	Semua anggota PKK Kecamatan dan kelurahan
2.b	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kelurahan	ABCGM
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Kelurahan	Masyarakat

3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan		
3.a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	peraentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Anjang sana TOKMAS	Masyarakat dan Tokoh agama
3.b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase linmas akti se kecamatan Cibeureum		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bimtek Linmas	Linmas se Kecamatan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		
4.a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesua penugasan kepala daerah		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Peringatan HUT RI dan HUT Kota	ASN se kecamatan
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Konsinyir Hari Besar nasional	Masyarakat
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pendataan Pembangunan dan Pendataan Sarana Pendidikan	Masyarakat serta sarana Pendidikan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cibeureum

Permasalahan Kecamatan Cibeureum dapat diidentifikasi dengan cara melihat capaian kinerja Renstra Kecamatan cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029 serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan kondisi/ kenyataan yang sudah terlaksanakan/ berjalan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Cibeureum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah kecamatan Cibeureum yaitu:

- a. Kualitas Aparatur belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi para aparatur
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan PD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
- e. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2. Perumusan Isu-Isu Strategis

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD Kecamatan Cibeureum untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis aktual di Kecamatan Cibeureum sebagai berikut:

Tabel 2.10 ISU STRATEGIS KECAMATAN CIBEUREUM

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Keberdaan pasar mingguan yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerja Sama dengan Daerah Perbatasan	Krisis sumber daya alam (SDA)	Penerapan standar sustainability	Kesenjangan pembangunan antar wilayah	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
Kesejahteraan Sosial	penurunan lahan pertanian		Iklim dan biodiversit y (keanekaragaman hayati)	Transisi energi	Penanggulangan kemiskinan melalui ketahanan pangan	Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Keterbatasan sarana prasarana dan anggaran		Disrupsi teknologi	Aging population	Mismatch pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Pemukimam kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan
Penyelenggaraan pelayanan publik/pemertintahan umum	Keterbatasan sumber daya manusia		Cyber insecurity	Sinkronisasi kebijakan makro dengan sektoral	Pemanfaatan teknologi	Kualitas sumber daya manusia
Pemerintahan Umum	optimalisasi peran RT RW untuk peningkatan pendapatan asli daerah dari PBB		Polarisasi sosial	Dampak hilirisasi	Degradasi lingkungan	Inovasi di pemerintahan
Ketetiban dan Ketentraman Umum	Optimalisasi penanganan darurat bencana		Perubahan Iklim Global	Bencana nasional dampak perubahan	sendimensi saluran irigasi	Bencana banjir perumahan dan lahan pertanian
Sekretariat	Optimalisasi Pelayanan publik		Krisis sumber daya alam (SDA)	Penerapan standar sustainability	Kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pembangunan Gapura dan Gedung Kantor Kecamatan Cibeureum
Ketetiban dan Ketentraman Umum	Optimalisasi pelayanan publik		Krisis sumber daya alam (SDA)	Penerapan standar sustainability	Kesenjangan pembangunan antar wilayah	Pembangunan Stasiun KAI di Cibeureum

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

Secara topografi Kecamatan Cibeureum dengan luas $\pm 1,069,85$ Ha/m² merupakan dataran rendah, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 352,75 Ha/m², lahan perkebunan 35,7 Ha/m² dan sisanya merupakan tanah kering 353,042 Ha/m², lain-lain 327,984 Ha/m². Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karakter Kecamatan Lembursitu lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Cibeureum cukup signifikan, namun upaya preventif harus tetap dilakukan.

Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Lembursitu akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi

saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

4. Inovasi di Pemerintahan

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Seperti halnya Kecamatan Cibeureum, Dalam rangka meningkatkan administrasi kepegawaian seluruh pegawai Kecamatan. Kecamatan Cibeureum meluncurkan Program SIPITAL KEKAL (Sistem Informasi Pelayanan Publik Digital Kecamatan dan Kelurahan), HAPUS CEBAN (Hari Pungut Sampah Cegah Banjir). Setiap Kelurahan pun memiliki inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kelurahan Sindang Palay memiliki inovasi SIPINTAR (Sistem Pelayanan Informasi diantar), Kelurahan Cibeureum Hilir memiliki inovasi SIPETRIK (system Pelayanan Administrasi Surat dikirim kerumah), Kelurahan Babakan memiliki inovasi GEBYAR PBB (Gerakan Bayar Pajak Babakan Bisa), Kelurahan Limus Nunggal memiliki inovasi SIBAPA ULIN (Sistem Bantuan Bayar Pajak Untuk Limus Nunggal).

5. Adanya Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Kepada Camat

Dengan adanya Kepwal Nomor 188.45/109.TAPEM/2019 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat yang di dalamnya terdapat 12 pelimpahan kewenangan yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan dan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada

di wilayah kecamatan meliputi : potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Kota Sukabumi. Dan alangkah elok dan bijaknya, 12 (Dua Belas) pelimpahan kewenangan ini disertai juga dengan pelimpahan anggaran, karena sehebat apapun kewenangan tanpa disertai anggaran yang memadai tidak akan berdampak signifikan dalam pencapaian target-target yang dibebankan dalam pelimpahan kewenangan tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Cibeureum

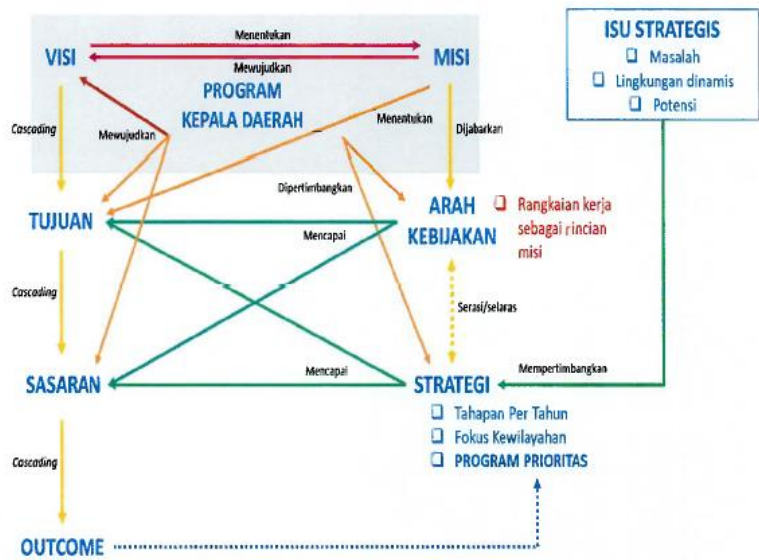
Tujuan Perangkat Daerah mengacu pada sasaran kepala daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap Perangkat Daerah. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi telah menetapkan tujuan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Cibeureum

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Sasaran merupakan *impact*/dampak yang ingin dicapai dari tahun ke tahun. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauh mana ketercapaian target. Sasaran Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

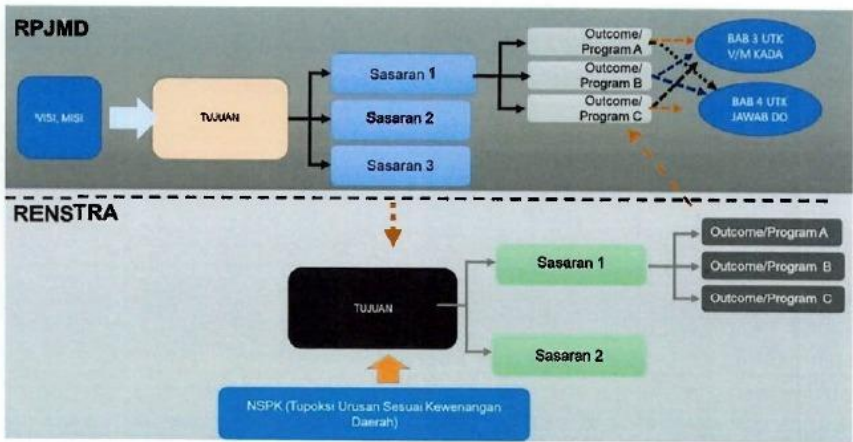
Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cibeureum tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Cibeureum



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Cibeureum yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

Sedangkan untuk tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini:

TABEL 3.1.

Logical Framework Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Cibeureum Kota Sukabumi 2025-2029

RPJMD	TUJUAN			
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif			
	INDIKATOR TUJUAN			
	Indeks Reformasi Birokrasi			
	SASARAN STRATEGIS			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota			
RENSTRA	INDIKATOR SASARAN			
	Indeks Pelayanan Publik			
	TUJUAN			
	1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak di Kecamatan Cibeureum			
	INDIKATOR TUJUAN			
	1.a. Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Cibeureum			
	SASARAN STRATEGIS			
	1.1. Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Cibeureum	1.2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan/Kelurahan		
	INDIKATOR SASARAN			
	1.1.a. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cibeureum	1.2.a. Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	1.2.b. Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	1.2.c. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

SASARAN KINERJA PROGRAM				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Internal di Sekretariat Kecamatan Cibeureum	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di keamatan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi/pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan
INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM				
Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cibeureum	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Cibeureum	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan
PROGRAM				
1.1.1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.2.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.2.2. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.2.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PENGAMPU				
Sekretaris Kecamatan Kasubag Perencanaan & Keuangan Kasubag Umum & Kepegawaian	Kasi Pemerintahan & Pelayanan Umum	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Kesejahteraan Sosial

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak Kecamatan Cibeureum		Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Cibeureum	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	
		Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Cibeureum	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan Cibeureum	Nilai	67,00	67,80	68,50	70,00	71,20	73,00	PENUNJANG
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan / Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan uraian tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi 2025-2030 tersebut diatas menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi indeks Reformasi Birokrasi dari Bidang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
- Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Aplikasi HAI GARLIK (Halaman Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Sukabumi) dari Bidang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
- Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan diperoleh dari Persentase LKK yang mengikuti Musrenbang dari Jumlah LKK yang ada.
- Indikator Persentase Permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani melalui Pembentukan tim Kecil di Kecamatan yang menaungi beberapa kelurahan serta berkoodinasi dengan Polsek, Danramil, Satpol PP dan Damkar yang ada.
- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan diperoleh dari persentase kegiatan monitoring dibandingkan dengan jumlah kegiatan penyaluran bantuan bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

3.3. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah dan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan.

Adapun kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan di Kecamatan ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan internal, faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan dalam periode Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL 3.3
PENAHAPAN RENSTRA
KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kapasitas SDM	Penguatan digilasisasi	Peningkatan inovasi	Peningkatan transparansi akuntabilitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Peningkatan Kapasitas SDM /Pemetaan dan Evaluasi	Pengembangan Sistem	Penguatan Transparansi	Pengembangan Budaya Kerja	Keberlanjutan Program
Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan publik	Pengembangan layanan berbasis digital	Implementasi pelayanan terpadu satu pintu	Integrasi database pelayanan dengan instansi terkait	Pencapaian standar pelayanan prima
Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPM, PKK)	Pengembangan program pemberdayaan berbasis teknologi	Penguatan sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat	Pembangunan infrastruktur pendukung (irigasi, drainase) berbasis partisipasi	Evaluasi dan keberlanjutan seluruh program pemberdayaan

3.4. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra). Arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Mengimplementasikan program pelatihan terstruktur untuk pegawai pemerintah Kota dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi informasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	
			Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	
			Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
			Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Optimalisasi Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode Tahun 2025-2029, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Peran strategis Kecamatan di Kota Sukabumi menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Cibeureum untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja.

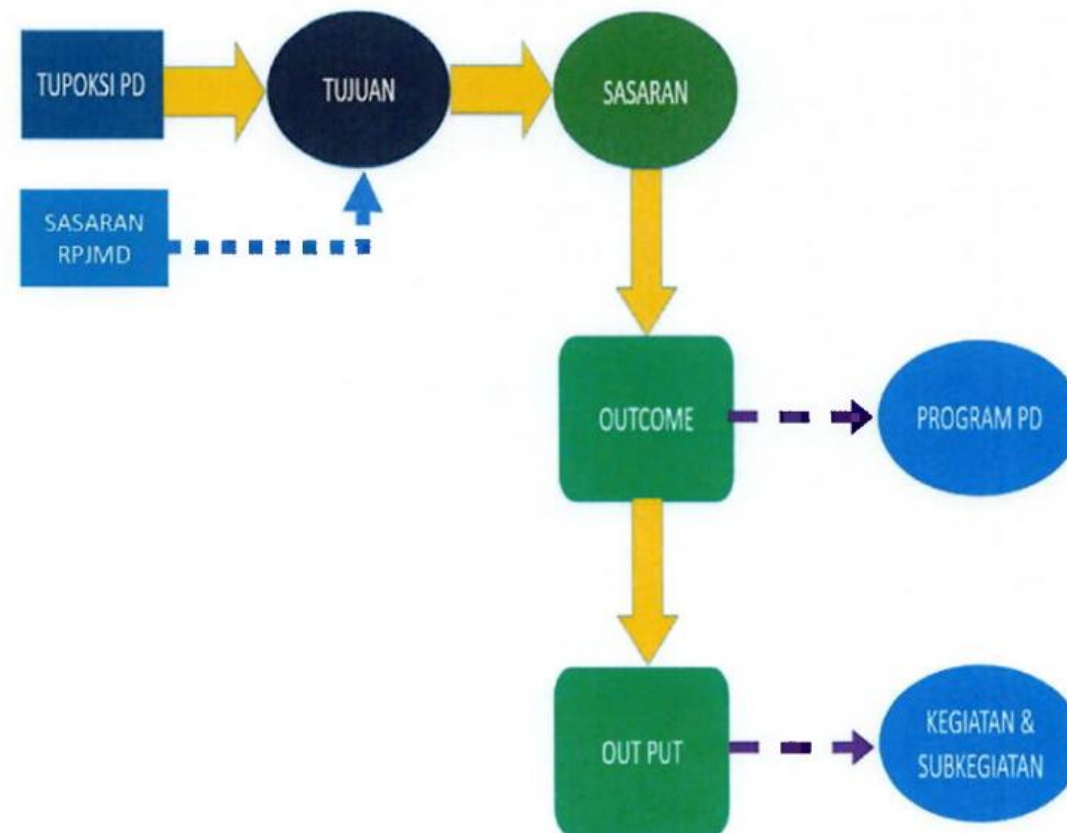
Rincian program dan kegiatan Kecamatan Cibeureum diuraikan seperti dibawah ini :

1. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
4. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public;
5. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Cibeureum periode tahun 2025 – 2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan pada Tabel 4.1

Penerapan dari peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi salah satu alasan utama dari perubahan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dan menjadi pedoman bagi perubahan Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Cibeureum



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 dan 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak Kecamatan Cibeureum				Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Cibeureum			Predikat Reformasi Birokrasi Melalui Aplikasi Surabi	Predikat Reformasi Birokrasi Melalui Aplikasi Surabi
		Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Cibeureum			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan Cibeureum			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Internal di Sekretariat Kecamatan Cibeureum		Persentase ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Cibeureum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan di tingkat kecamatan, dengan fokus pada perbaikan sistem dan tata laksana internal pemerintahan. IRB General berfokus pada perbaikan hulu terkait masalah-masalah umum birokrasi, seperti kelembagaan, SDM, tata laksana, akuntabilitas, dan pengawasan Kategori Indeks Reformasi Birokrasi: Kategori AA (Istimewa): Nilai > 90-100. Kategori A (Sangat Baik): Nilai > 80-90. Kategori BB (Baik): Nilai > 70-80. Kategori B (Cukup Baik): Nilai > 60-70.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General lembaga/instansi dihitung dengan menjumlahkan nilai RB General dan RB Tematik. Nilai RB General dihitung dari capaian strategi pelaksanaan, tingkat implementasi kebijakan, dan capaian strategis. Nilai RB Tematik dihitung dari strategi pembangunan, dan capaian dampak RB Tematik.
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah berkualitas	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rangkaian aktivitas penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan penganggaran, serta pengukuran dan penilaian pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun dokumen RKA-SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun dokumen DPA-SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pengelolaan administrasi aset daerah mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan hingga penghapusan barang milik daerah	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		kegiatan yang mencakup seluruh proses administrasi dan penganggaran untuk pembayaran hak-hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara rutin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perbandingan antara jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan dengan target jumlah orang dapat gaji dan tunjangan

				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengelolaan administrasi sumber daya manusia meliputi perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, pembinaan, dan administrasi hak dan kewajiban pegawai	Perbandingan antara jumlah ketersediaan administrasi kepegawaian dengan target dikali 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi aparatur di SKPD	Perbandingan antara jumlah paket pakaian dinas yang diberikan dengan target jumlah paket
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan pelatihan atau pembekalan kepada aparatur, pemangku kebijakan, atau Masyarakat terkait penerapan atau implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perbandingan antara jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis dengan target peserta

				Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyelenggaraan ketatausahaan, korespondensi, kearsipan, dan pelayanan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan. Dokumen administrasi umum meliputi laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen administrasi umum yang disusun dengan target dikali 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasang komponen-komponen yang diperlukan dalam instalasi listrik dan penerangan di bangunan kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan Peralatan dan Perlengkapan yang diperlukan di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan tamu yang datang ke kantor	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempertemukan berbagai pihak atau stakeholder terkait dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (SKPD)	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan

				Tersedianya barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Serangkaian proses pemenuhan kebutuhan barang/aset daerah mulai dari perencanaan hingga serah terima untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan	Perbandingan antara realisasi pengadaan BMD dengan target dikali 100%
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kendaraan operasional atau Lapangan	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan mebel di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kegiatan yang bertujuan untuk pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Kegiatan yang bertujuan untuk Pengadaan Aset Tak Berwujud di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan layanan/jasa seperti komunikasi, listrik, air, keamanan, dan jasa lainnya untuk mendukung operasional pemerintahan daerah. Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		kegiatan yang mencakup seluruh proses administratif dan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kegiatan yang bertujuan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan

				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kegiatan yang bertujuan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kegiatan yang mencakup seluruh penyediaan dan pengelolaan layanan pendukung administrasi perkantoran	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Terpeliharanya barang milik daerah sesuai dengan fungsinya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Upaya menjaga, memperbaiki, dan merawat aset/barang milik daerah agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal.	Perbandingan antara unit BMD yang dipelihara dengan target dikali 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan, kesiapan, dan legalitas kendaraan dinas operasional atau lapangan melalui penyediaan layanan pemeliharaan rutin dan berkala, penggantian komponen, serta pembayaran pajak dan pengurusan perizinan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perbandingan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target kendaraan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan memperpanjang usia pakai peralatan dan mesin non-kendaraan	PerbandinganJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kegiatan yang dilakukan secara rutin atau insidental untuk menjaga, memperbaiki, dan/atau memulihkan kondisi fisik gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap layak, aman, fungsional, serta memenuhi standar teknis dan estetika.	PerbandinganJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target
			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeureum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Jumlah Pelayanan Publik di Kecamatan (perizinan, adminduk, pelayannan umum dan pelayanan lainnya) dirinci oleh kasi kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang dilakukan di kecamatan dikecamatan dibagi jumlah pelayanan publik yang sesuai ketentuan regulasi

				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Sinkronisasi seluruh kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan. Kegiatan pemerintahaan meliputi Kegiatan P2RW dan Operasi Penyisiran PBB-P2 & Opsen PKB	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kegiatan yang melibatkan upaya koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun vertikal, untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, dan terintegrasi.	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang tidak tertangani oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan.	Perbandingan antara jumlah buku profil Kecamatan yang disusun dengan target buku profil Kecamatan dikali 100%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan		Kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan / Kelurahan			Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan			jumlah kehadiran LKK dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan dibagi LKK yang diundang x100%. LKK terdiri dari Karang Taruna, RT,RW, Posyandu, LPM, dan PKK.	% Partisipasi Masyarakat LKK = $\frac{\text{jumlah kehadiran LKK dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan} \times 100}{\text{LKK}}$
					Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani			Jumlah permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani dibagi yang dilaporkan x 100%	Jumlah permasalahan/ pengaduan / konflik sosial yang ditangani dibagi yang dilaporkan x 100%

					Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan			persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang dilaksanakan meliputi monitoring &fasilitasi PHBN,PHBI,Pendataan, Forkopimcam, Bimtek	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan dibagi yang telah di rencanakan x 100%
			Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang		Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang hadir atau terlibat aktif dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan terhadap jumlah total LKK yang ada di wilayah	Perbandingan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang hadir atau terlibat aktif dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan terhadao jumlah total LKK yang ada di wilayah
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan untuk peningkatan efektifitas program pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.	Perbandingan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dankel (infrastruk tur)	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan atau instansi terkait dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan fisik infrastruktur dasar di wilayah kelurahan	Perbandingan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target

				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	insentif RT RW Linmas dan Kegiatan pemberdayaan	Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi, dan penguatan kelembagaan lokal di tingkat kelurahan.	Perbandingan umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target
			Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan		Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Ukuran sejauh mana masyarakat terlibat aktif dan mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau kesadaran dalam mendukung terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungannya	Perbandingan jumlah masyarakat yang hadir/ ikut/berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas keamanan terhadap Jumlah lulus pelatihan/ikut aktif dikali 100%
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
			Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi/pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan		Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Ukuran sejauh mana kecamatan melaksanakan kegiatan pendukung (fasilitasi, koordinasi, atau pembinaan) yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, terhadap jumlah kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan.	jumlah pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dibagi yang telah di rencanakan x 100%

				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pembinaan ideologi, semangat persatuan dan kesatuan, serta pemahaman nilai-nilai kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat guna memperkuat ketahanan nasional di tingkat kecamatan	Perbandingan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan target
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Kegiatan fasilitasi, koordinasi, atau pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi tugas pusat, namun dalam praktiknya tidak ditangani langsung oleh instansi vertikal, sehingga menjadi tanggung jawab kecamatan dalam bentuk dekonsentrasi fungsional atau peran pelengkap administratif	Perbandingan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Pendataan Kegiatan Pembangunan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		Kegiatan fasilitasi, koordinasi, atau pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi tugas pusat, namun dalam praktiknya tidak ditangani langsung oleh instansi vertikal, sehingga menjadi tanggung jawab kecamatan dalam bentuk dekonsentrasi fungsional atau peran pelengkap administratif	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen

Kinerja : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	730.000,00	5	350.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	470.000,00	5	470.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	515.000,00	5	350.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	470.000,00	5	470.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Kinerja : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	900.000,00	5	950.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.500,00	5	1.000.500,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Persen	5.856.416.064,00	100	5.666.229.922,00	100	5.757.864.127,00	100	5.757.864.127,00	100	5.836.859.349,00	100	5.836.859.349,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Kinerja : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	5.850.679.564,00	432	5.663.479.922,00	432	5.755.067.627,00	432	5.755.067.627,00	432	5.833.809.349,00	432	5.833.809.349,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.440.000,00	5	1.500.000,00	5	1.525.000,00	5	1.525.000,00	5	1.725.000,00	5	1.725.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1.811.500,00	5	750.000,00	5	761.500,00	5	761.500,00	5	775.000,00	5	775.000,00
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
Kinerja : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1.485.000,00	5	500.000,00	5	510.000,00	5	510.000,00	5	550.000,00	5	550.000,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	Persen	-	100	26.500.000,00	100,00	26.920.000,00	100	26.920.000,00	100	27.850.000,00	100	27.850.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
Kinerja : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	-	27	15.000.000,00	27	15.250.000,00	27	15.250.000,00	27	15.750.000,00	27	15.750.000,00
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	40	11.500.000,00	40	11.670.000,00	40	11.670.000,00	40	12.100.000,00	40	12.100.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													

Output : Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Persen	159.120.300,00	100	166.080.000,00	100	168.565.000,00	100	168.565.000,00	100	181.700.000,00	100	181.700.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Kinerja : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2.064.000,00	1	3.000.000,00	1	3.045.000,00	1	3.045.000,00	1	3.200.000,00	1	3.200.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35.859.000,00	6	32.500.000,00	6	32.980.000,00	6	32.980.000,00	6	44.000.000,00	6	44.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Kinerja : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4.962.300,00	3	5.580.000,00	3	5.665.000,00	3	5.665.000,00	3	5.750.000,00	3	5.750.000,00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu													
Kinerja : Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	81.855.000,00	3	65.000.000,00	3	65.975.000,00	3	65.975.000,00	3	66.900.000,00	3	66.900.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	34.380.000,00	2	60.000.000,00	2	60.900.000,00	2	60.900.000,00	2	61.850.000,00	2	61.850.000,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Output : Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Persen	100.420.000,00	100	90.000.000,00	100	91.350.000,00	100	91.350.000,00	100	92.855.000,00	100	92.855.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Kinerja : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	3	70.000.000,00	3	71.050.000,00	3	71.050.000,00	3	72.250.000,00	3	72.250.000,00
Sub kegiatan Pengadaan Mebel													

Kinerja : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-		-	0		1	-	1	-	1	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	85.420.000,00	18	20.000.000,00	18	20.300.000,00	18	20.300.000,00	18	20.605.000,00	18	20.605.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud													
Kinerja : Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	15.000.000,00	1	-		-		-		-		-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Output : Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Persen	931.127.700,00	100	891.488.000,00	100	904.860.320,00	100	904.860.320,00	100	918.432.965,00	100	918.432.965,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.030.000,00	1	2.030.000,00	1	2.150.000,00	1	2.150.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	79.997.500,00	3	84.040.000,00	3	85.300.600,00	3	85.300.600,00	3	86.580.000,00	3	86.580.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Kinerja : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	132.000.000,00	1	132.000.000,00	1	133.980.000,00	1	133.980.000,00	1	135.900.000,00	1	135.900.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Kinerja : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	717.630.200,00	1	673.448.000,00	1	683.549.720,00	1	683.549.720,00	1	693.802.965,00	1	693.802.965,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

Output : Terpeliharanya barang milik daerah sesuai dengan fungsinya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	Persen	199.384.000,0 0	100	261.047.400,0 0	100	264.965.000,0 0	100	264.965.000,0 0	100	265.045.000,0 0	100	265.045.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	199.384.000,0 0	30	191.865.400,0 0	30	194.745.000,0 0	30	194.745.000,0 0	30	194.745.000,0 0	30	194.745.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	6	10.000.000,00	6	10.150.000,00	6	10.150.000,00	6	10.200.000,00	6	10.200.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	2	59.182.000,00	3	60.070.000,00	3	60.070.000,00	3	60.100.000,00	3	60.100.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeureum	Persen	1.216.914.275 ,00	89	176.538.168,0 0	89,2	179.362.779,0 0	89,5	179.362.779,0 0	89,77	182.053.220,0 0	90	182.053.220,00
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
Output :	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	1.180.037.400 ,00	100	145.185.168,0 0	100	147.510.000,0 0	100	147.510.000,0 0	100	149.715.000,0 0	100	149.715.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

Kinerja : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1.128.980.000,00	16	68.749.168,00	16	69.930.000,00	16	69.930.000,00	16	70.970.000,00	16	70.970.000,00
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
Kinerja : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	51.057.400,00	2	76.436.000,00	2	77.580.000,00	2	77.580.000,00	2	78.745.000,00	2	78.745.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													
Output :	Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	36.876.875,00	100	31.353.000,00	100	31.852.779,00	100	31.852.779,00	100	32.338.220,00	100	32.338.220,00
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan													
Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	36.876.875,00	3	31.353.000,00	3	31.852.779,00	3	31.852.779,00	3	32.338.220,00	3	32.338.220,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Outcome : Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Persen	1.667.417.200,00	100	3.162.804.750,00	100	3.213.409.626,00	100	3.213.409.626,00	100	3.261.610.770,00	100	3.261.610.770,00
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
Output :	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	126.390.200,00	100	123.000.000,00	100	130.950.000,00	100	130.950.000,00	100	132.914.250,00	100	132.914.250,00

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Kinerja : Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	126.390.200,00	10	123.000.000,00	10	130.950.000,00	10	130.950.000,00	10	132.914.250,00	10	132.914.250,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
Output :	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	1.541.027.000,00	100	3.039.804.750,00	100	3.082.459.626,00	100	3.082.459.626,00	100	3.128.696.520,00	100	3.128.696.520,00
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
Kinerja : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pokmas	33.627.000,00	4	58.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.900.000,00	4	60.900.000,00
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
Kinerja : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	-	7	480.000.000,00	7	490.000.000,00	7	490.000.000,00	7	497.350.000,00	7	497.350.000,00
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
Kinerja : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	1.507.400.000,00	12	2.501.804.750,00	12	2.532.459.626,00	12	2.532.459.626,00	12	2.570.446.520,00	12	2.570.446.520,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
Outcome : Meningkatkan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	42.286.400,00	100	39.847.000,00	100	40.484.552,00	100	40.484.552,00	100	41.091.820,00	100	41.091.820,00
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													

Output :	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	42.286.400,00	100	39.847.000,00	100	40.484.552,00	100	40.484.552,00	100	41.091.820,00	100	41.091.820,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	42.286.400,00	2	39.847.000,00	2	40.484.552,00	2	40.484.552,00	2	41.091.820,00	2	41.091.820,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Outcome : Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi/pembi naan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembi naan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	30.221.875,00	100	46.154.500,00	100	46.892.972,00	100	46.892.972,00	100	47.596.367,00	100	47.596.367,00
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													
Output :	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	30.221.875,00	100	46.154.500,00	100	46.892.972,00	100	46.892.972,00	100	47.596.367,00	100	47.596.367,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													

Kinerja : Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	3.784.375,00	42	2.470.000,00	42	2.507.050,00	42	2.507.050,00	42	2.536.367,00	42	2.536.367,00
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	22.800.000,00	42	41.470.000,00	42	42.110.000,00	42	42.110.000,00	42	42.750.000,00	42	42.750.000,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal													
Kinerja : Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Pendataan Kegiatan Pembangunan	Dokumen	3.637.500,00	2	2.214.500,00	2	2.275.922,00	2	2.275.922,00	2	2.310.000,00	2	2.310.000,00

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeureum sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program prioritas Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi beserta pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 4.4.

TABEL 4.3
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Mendukung Misi 5 RPJMD
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan P2RW
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Peningkatan PAD Melalui PBB

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian

kinerja. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Cibeureum. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Kecamatan Cibeureum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN CIBEUREUM

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Cibeureum	Predikat	B	B	B	B	BB	BB
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kecamatan Cibeureum	Nilai	67	67,8	68,5	70	71,2	73
3	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeureum serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum Tahun 2025-2029 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Di susun untuk peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati pada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran. Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian baik dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan penilaian. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Sukabumi. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Kecamatan Cibeureum Tahun 2025-2029.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA perlu terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil dari proses pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kedua laporan tersebut menjadi alat perbaikan (*improving*) dalam upaya peningkatan kinerja satuan kerja di masa yang akan datang, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra ini di Wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

Sukabumi, 05 Maret 2025

WALI KOTA SUKABUMI

H. AYEP ZAKI